

**TANTANGAN *IMT-GT* DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2017-2021**

**Feby Rachma Alfi Dhiandra<sup>1)</sup>, Dudy Heryadi<sup>2)</sup>, Laode Muhammad Fathun<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>1</sup>E-mail: [febyrad@gmail.com](mailto:febyrad@gmail.com)

<sup>2</sup>E-mail: [dudy.heryadi@upnvj.ac.id](mailto:dudy.heryadi@upnvj.ac.id)

<sup>3</sup>E-mail: [laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id](mailto:laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id)

**Abstract**

*Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT) is an economic cooperation forum participated by Jambi Province. IMT-GT functions as an investment facilitator, and the goal is to connect Jambi Province with potential investors. The use of qualitative methodologies in this study will significantly assist the author in knowing and explaining the dynamics of the challenges of IMT-GT as a KESR forum in increasing foreign investment in Jambi Province in 2017–2021, along with the opportunities and challenges faced by IMT-GT in the process. The results of the study show that there is an IMT-GT framework for the period 2017-2021 found challenges that affect the dynamics of economic growth in Jambi Province, such as Thailand's inability to invest in Jambi Province for financial reasons, the Covid-19 pandemic that affects the global economy, and Jambi Province is assessed still does not facilitate investors to enter. This study aims to discuss the challenges faced by IMT-GT during cooperation in Jambi Province; the period chosen is the initial treatment of the 2017-2021 IMT-GT IB framework. Varies every year, as well as in Malaysia and Thailand. However, Thailand's economic growth tends to be lower than Indonesia and Malaysia's.*

**Keywords :** *International Cooperation, Foreign Direct Investment, IMT-GT Jambi Province*

**1. PENDAHULUAN**

Globalisasi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama dalam aspek ekonomi. Yang dimaksudkan dengan globalisasi ekonomi adalah perubahan dalam perekonomian dunia secara struktural dan dinamis mengikuti kemajuan zaman yang terus berkembang pesat. Globalisasi ekonomi ditandai dengan mudarnya batasan kegiatan ekonomi yang sebelumnya hanya bersifat nasional menjadi internasional dengan melibatkan partisipasi banyak negara. Arus produk dan faktor produksi lintas negara sudah sama mudahnya seperti lintas kota di suatu negara atau lintas desa dalam satu kecamatan (Zaroni, 2015)

Indonesia telah menyadari pentingnya mengikuti perkembangan globalisasi, seperti yang dilontarkan Presiden Soeharto pada acara

*2nd Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders Summit* di Bogor pada tahun 1994 bahwa “mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengambil bagian dalam globalisasi”. Dengan Indonesia mengikuti perkembangan globalisasi ekonomi, maka peluang negara untuk mendapatkan hasil produksi semakin luas, masuknya transfer ilmu pengetahuan terkait ekonomi yang dapat berguna bagi para pelaku usaha lokal, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan diakuinya eksistensi Indonesia dalam perekonomian global (Winarno, 2008).

Indonesia perlu menyiapkan diri untuk bersaing dalam perekonomian global. Tetapi sebelumnya perlu diperhatikan kondisi perekonomian nasional terlebih dahulu, karena negara yang siap bersaing dalam ekonomi global perlu memiliki pertumbuhan ekonomi yang

merata disetiap daerahnya. Berdasarkan data BPS pada kuartal III tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sulawesi mencapai 6,77 persen, Maluku dan Papua sebesar 6,87 persen, dan Jawa sebesar 5,74 persen. Sementara Sumatera sebesar 4,72 persen dan Kalimantan sebesar 3,45 persen. Bali dan Nusa Tenggara bahkan terkontraksi 0,65 persen. Sedangkan, berdasarkan data BPS pada kuartal II tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk Sulawesi mencapai 8,51%, Maluku dan Papua sebesar 8,75%, Jawa sebesar 7,88%, Sumatera sebesar 5,27%, Kalimantan sebesar 6,28%, dan Bali serta Nusa Tenggara 3,70%. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk masing- masing daerah cenderung tidak stabil dan belum merata. Indonesia perlu menyiapkan diri untuk bersaing dalam perekonomian global. Tetapi sebelumnya perlu diperhatikan kondisi perekonomian nasional terlebih dahulu, karena negara yang siap bersaing dalam ekonomi global perlu memiliki pertumbuhan ekonomi yang merata disetiap daerahnya. Tidak meratanya pertumbuhan

ekonomi dari masing-masing daerah dikarenakan pembangunan negara biasanya lebih terfokus pada pembangunan ibukota dan sekitarnya saja, sedangkan wilayah perbatasan cenderung lambat dalam melakukan pembangunannya sehingga pertumbuhan ekonominya tersendat. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh halangan lain seperti lokasi wilayah perbatasan yang jauh dari pusat kegiatan dan intervensi dari luar sangat terbatas (Budianta, 2010).

Salah satu wilayah perbatasan di Indonesia adalah pulau Sumatera, pulau Sumatera secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Sebagai wilayah perbatasan, pulau Sumatera secara tidak langsung menjadi pintu masuk jalur lalu lintas ekonomi dari negara luar ke Indonesia. Pulau Sumatera diuntungkan secara geografis untuk bersaing dalam globalisasi ekonomi, akan tetapi tiap provinsi di pulau Sumatera memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang belum merata, dapat dibuktikan dengan data berikut:

**Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatra PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHK Tahun Dasar 2010 dalam bentuk persen**

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010(%)					
No	Provinsi	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Provinsi Aceh	4.61	4.14	-0.37	2.79
2	Provinsi Sumatera Utara	5.18	5.22	-1.07	3.11
3	Provinsi Sumatra Barat	5.14	5.01	-1.62	2.84
4	Provinsi Riau	2.35	2.81	-1.13	1.34
5	Provinsi Jambi	4.69	4.35	-0.44	2.87
6	Provinsi Sumatra Selatan	6.01	5.69	-0.11	3.86
7	Provinsi Bengkulu	4.97	4.94	-0.02	3.30
8	Provinsi Lampung	5.23	5.26	-1.67	2.94
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.45	3.32	-2.3	1.82
10	Provinsi Kepulauan Riau	4.47	4.83	-3.8	1.83

Berdasarkan tabel terlampir, menunjukan laju pertumbuhan ekonomi pulau Sumatera berbeda-beda, laju pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan, disusul oleh Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dan yang terakhir Provinsi Riau. Selisih perbedaan laju pertumbuhan oleh Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki presentase laju pertumbuhan tertinggi dengan Provinsi Riau yang memiliki laju pertumbuhan terendah adalah sebesar 2,25%.

Salah satu provinsi Sumatera yang patut mendapatkan perhatian adalah Provinsi

Jambi. Provinsi Jambi memiliki posisi geografis yang sangat strategis, hal ini memberikan potensi luar biasa sebagai poros distribusi antar Provinsi di Sumatera. Tidak hanya itu, Provinsi Jambi juga sangat berpotensi untuk menjadi poros transportasi barang dari dan keluar Sumatera karena berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas Internasional. Posisi strategis itu semakin diperkuat karena Provinsi Jambi juga berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Provinsi Jambi memiliki aneka potensi ekonomi yang sangat beragam. Komoditi unggulan yang dimiliki Provinsi Jambi terbagi atas dua katagori, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak. Adapun komoditi yang dapat diperbaharui seperti: kelapa sawit, karet, teh, kopi, kelapa dan pinang. Sumber yang tidak dapat diperbaharui seperti: minyak mentah, gas, geothermal dan batu bara (Umar, 2018).

Pada IB IMT-GT periode 2017-2021, Provinsi Jambi adalah salah satu Provinsi Indonesia yang mendapat perhatian. Seperti pada pada pertemuan 16th IMT-GT *Chief Ministers and Governors Forum* yang dilaksanakan di Krabi, Thailand pada 12 September 2019. IMT-GT memberikan kesempatan bagi Provinsi Jambi untuk melakukan paparan promosi potensi ekonomi, pada pemaparannya Provinsi Jambi mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya dengan menawarkan kemudahan birokrasi perizinan investasi secara online melalui website [dpmptsp.jambiprov.go.id](http://dpmptsp.jambiprov.go.id). Dan pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2019 IMT-GT melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi, kunjungan ini diwa *Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT)* Bapak Firdaus Dahlan beserta tim. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari program *Reaching out CIMT* ke provinsi yang dijadikan sorotan di IMT-GT untuk mendapatkan informasi langsung dari para pemangku kepentingan setempat. Tim melakukan pertemuan dengan Gubernur Jambi, Walikota Jambi dan Kadin

Jambi untuk mendiskusikan perkembangan perekonomian Provinsi Jambi, serta memberikan masukan yang dapat dilakukan Provinsi Jambi dalam membuat strategi perihal penanaman modal asing. Selain itu, diadakan kuliah umum di Universitas Jambi sebagai langkah memberikan edukasi bagi pemuda di Provinsi Jambi mengenai kerjasama sub-regional (IMT-GT *Official Website*).

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk melihat dinamika kerjasama yang dilakukan IMT-GT dalam meningkatkan penanaman modal asing di Provinsi Jambi, periode waktu yang dipilih adalah awal diperlakukannya *framework* IB IMT-GT 2017-2021.

Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini. [Times New Roman, 11, normal].

## 2. METODE PENELITIAN

Penggunaan metodologi kualitatif dalam penelitian ini akan sangat membantu penulis dalam mengetahui dan memaparkan dinamika kerjasama IMT-GT sebagai sebuah forum KESR dalam meningkatkan penanaman modal asing di Provinsi Jambi tahun 2017–2021 beserta peluang dan tantangan yang diharapkan IMT-GT dalam prosesnya. Diantara pendekatan-pendekatan yang ada, penulis memilih menggunakan pendekatan studi kasus dalam menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini berangkat dengan pertanyaan “bagaimana” untuk mengkaji bagaimana dinamika kerjasama IMT-GT dalam meningkatkan penanaman modal asing di Provinsi Jambi tahun 2017-2021. Pada penelitian ini penulis menggunakan *single instrumental case study* atau studi kasus instrumen tunggal yang berfokus pada suatu masalah atau perhatian yang bertujuan untuk

memahami dan menambah wawasan akan sesuatu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, arsip, ataupun artikel (Creswell & Poth, 2016). Menurut Sugiyono, memperoleh data sekunder dapat dilakukan melalui membaca secara keseluruhan, mempelajari isi dan memahami data melalui media yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012). Data ini penulis dapatkan dengan mengulas bahan bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, data website resmi, artikel di media cetak maupun online, situs internet serta data lainnya yang mendukung penelitian. Sumber data penulis dapatkan dengan mengulas bahan bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, data website resmi, artikel di media cetak maupun online, situs internet serta data lainnya yang mendukung penelitian. Penulis melakukan teknik pengumpulan data sekunder dengan tipe pengumpulan data dokumen atau studi kepustakaan (*Library Research*) melalui publikasi resmi dari laporan pertemuan *Chief Minister and Governors Forum* IMT-GT, *Implementation Blueprint* (IB) IMT-GT, serta data-data yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi.

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis. [Times New Roman, 11, normal].

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kerangka Kerja *Implementation Blueprint* (IB) IMT-GT Periode 2017-2021**

IMT-GT selalu memperbaharui kerangka kerjanya setiap 20 tahun sekali yang

dinamakan dengan kerangka kerja jangka panjang, dan 5 tahun sekali untuk kerangka kerja jangka pendek. Kerangka Kerja jangka panjang dinamai dengan *Vision 2036* atau diterjemahkan menjadi Visi di tahun 2036, *Vision 2036* ini dirancang pada tahun 2016 yang dimana isinya adalah target-target yang diharapkan dapat dicapai ditahun 2036. Untuk mencapai *Vision 2036* perlu dibuat kerangka kerja jangka pendek yang isinya lebih realistis dan mendetail. Untuk tahun 2017 sampai 2021 IMT-GT kerangka kerja yang dinamakan dengan *Implementation Blueprint* (IB) atau cetak biru periode 2017-2021, adapun isinya sebagai berikut: (1) memajukan perdagangan dan investasi, (2) membangun pariwisata, (3) membangun konektivitas, (4) memajukan agrikultur, (5) jasa dan produk halal, (6) menjaga dan melestarikan lingkungan (7) memajukan pendidikan, ketenagakerjaan dan budaya (*Implementation Blueprint* IMT-GT 2017-2021, IMT-GT *Official Website*).

Meskipun terdapat 7 tujuan pada *Implementation Blueprint* (IB) 2017-2021. Pada pertemuan IMT-GT dalam rangka *me-Review* Capaian Kerjasama Ekonomi Sub-regional IMT-GT pada tanggal 29 September 2020 di Hotel Santika Premiere, Jakarta. Pada pertemuan ini Indonesia diwakili oleh Ir. Netty Muharni selaku Pimpinan rombongan Asisten Deputi Kerjasama Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Disepakati dua sasaran strategis yang dijadikan prioritas yaitu: peningkatan investasi dan ekspor serta peningkatan pariwisata (Muharni, 2020).

Sejak tahun 2007 hingga sekarang, peningkatan investasi dan ekspor selalu dijadikan prioritas utama, karena bidang perdagangan dan investasi yang paling memberikan peningkatan pada perekonomian negara anggota. Seperti pada kerangka kerja IMT-GT tahun 2007-2012 yang dinamakan dengan *Roadmap for Development: Building a Dynamic Future*, perdagangan dan investasi

menjadi poin utama yang lalu diikuti oleh transportasi dana anergi, pertanian, *halal product*, pariwisata dan SDM (*Mid-review Roadmap for Development 2007-2012. Asian Development Bank, 2010*). Begitu pula dengan kerangka kerja IMT-GT tahun 2012-2016, perdagangan dan investasi juga menjadi fokus utama yang lalu diikuti oleh Transportasi dan Teknologi ICT, pelayanan dan produk halal, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan, serta industri berbasis agro dan agrikultur (*Implementation Blueprint 2012-2016, IMT-GT Official Website*).

**Working Group on Trade and Investment (WGTI)**

Dalam usaha meningkatkan perdagangan dan investasi yang menjadi sektor prioritas IMT-GT, dilaksanakan oleh *Working Group on Trade and Investment (WGTI)* atau dalam bahasa Indonesia menjadi kelompok kerja perdagangan dan investasi. Fungsi dibentuknya WGTI adalah untuk menjadikan negara anggota IMT-GT sebagai wilayah ramah perdagangan dan investasi bagi investor diluar ataupun sesama anggota IMT-GT, selain itu WGTI juga berperan sebagai “*enabler*” pada tujuan utama IMT-GT yaitu memajukan ekonomi. (*WGTI, IMT-GT Official Website*).

Pada *Implementation Blueprint* IMT-GT Periode 2012-2016, ditemukan beberapa tantangan investasi dan perdagangan, yaitu :

1. Kompetisi ekonomi pada wilayah ASEAN semakin menantang, khususnya persaingan untuk mendapat *Foreign Direct Investment (FDI)*. Oleh karena itu diperlukan strategi yang lebih efektif dari WGTI.
2. Investor swasta menunjukkan adanya kehilangan minat terhadap IMT-GT, sehingga WGTI perlu melakukan pendekatan agar dapat menarik kembali investor untuk masuk.
3. Ditemukannya hambatan teknis seperti biaya transaksi bisnis yang relatif tinggi dan birokrasi yang bertele-tele, yang dimana hal ini membuat minat investor dan ekspor menurun (*WGTI, Implementation Blueprint 2017-2021, IMT-GT Official Website*).

Untuk menjawab tantangan yang ditemukan IMT-GT sektor perdagangan dan investasi tahun 2012-2016 diatas, IMT-GT membuat rencana strategis jangka pendek yang aplikatif melalui kerangka kerja jangka pendek *Implementation Blueprint* IMT-GT 2017-2021. Berikut adalah strategi dan rencana aksinya:

**Tabel 2. Online Single Submission (OSS) Program**

Online Single Submission (OSS) Program	Merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan investasi melalui penerapan sistem aplikasi perizinan terintegrasi secara elektronik
	Lebih mudah untuk mendapatkan berbagai izin usaha yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis (izin lokasi, izin lingkungan atau izin mendirikan bangunan), apakah itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan mekanisme kepatuhan komitmen
	Membantu terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan mendapatkan lisensi dengan cara yang aman, cepat, dan real time
	Membantu melaporkan dan memecahkan masalah lisensi di satu tempat
	Membantu menyimpan data lisensi dalam satu identitas (NIB)

Pada dasarnya, OSS merupakan aplikasi yang memudahkan investor dalam mengurus

perizinan investasi melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik, sehingga selain lebih efisien karena perizinan dapat diselesaikan di mana saja, setiap pendaftaran

dan kegiatan lebih transparan dan bebas dari penipuan. Karena tidak perlu bertatap muka, perizinan investasi akan didukung oleh birokrasi tradisional yang harus mengurus kantor yang bersangkutan. Disebut transparan karena setiap pengusaha yang mendaftar OSS akan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga pendaftaran dan kegiatan lebih mudah dipantau, aman, dan *real-time*. (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021).

### Insentif Investasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 dijelaskan bahwa pemberian insentif merupakan dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah (PP No 24 Tahun 2019). Pemberian intensif ini bertujuan untuk memudahkan investor dalam melakukan usahanya di daerah dan sebagai daya tarik untuk menarik investor masuk.

Ada dua kemudahan investasi lainnya: *Tax Holiday* dan *Tax Allowances*. *Tax Holiday* adalah pembebasan pajak bagi perusahaan yang baru dibangun di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan *Tax Allowance* adalah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanam.

### Dana Insentif Daerah Provinsi Jambi

**Tabel 3. Dana Intensif Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2020**

Pemerintah	2018	2019	2020		%
			Plafon	Realisasi	
Provinsi Jambi	9,13	25,74	13,77	13,77	100%
Kabupaten Batanghari	25,25	35,47	39,32	39,32	100%
Kabupaten Tanjung Jabung	-	-	27,09	27,09	100%

Barat					
Distrik Bungo	-	-	23,06	23,06	100%
Distrik Sarolangun	44,00	10,00	33,00	33,00	100%
Kabupaten Kerinci	35,25	33,54	29,24	29,24	100%
Kabupaten Merangin	-	43,60	11,25	11,25	100%
Timur					
Distrik Tebo	26,75	-	26,93	26,93	100%
Kabupaten Muaro Jambi	35,25	9,91	74,03	74,03	100%
Kota Jambi	18,00	11,29	37,75	37,75	100%
Kota Sungai Penuh	17,75	44,14	35,04	35,04	100%
Seluruh	211,38	223,87	358,08	358,08	100%

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dalam rangka mendorong peningkatan dan/atau pencapaian di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan publik, pelayanan publik esensial, dan/atau kesejahteraan. Umum. Di masa pandemi 2020, ada syarat tambahan bagi daerah untuk mendapatkan hibah insentif daerah (DJPb Jambi, 2021).

### Tantangan Kerja Sama IMT-GT dalam Upaya Peningkatan Investasi Asing di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Dalam proses kerja sama IMT-GT dengan Provinsi Jambi, ditemukan beberapa tantangan yang menjadi kendala; tantangan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu internal yang berasal dari dalam dan eksternal yang berasal dari luar IMT-GT dan Provinsi Jambi; berikut penjelasan mengenai tantangan kerjasama yang terjadi selama periode IMT-GT IB 2017-2021:

#### Tantangan Internal

Provinsi Jambi memiliki lokasi yang strategis berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Meski begitu, komponen esensial dalam suatu provinsi, seperti infrastruktur, topografi, dan kebutuhan akan SDM terlatih,

menjadi kendala utama dalam menjadikan Provinsi Jambi sebagai provinsi maju (Aggarwal, 2022). Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Jambi dinilai masih minim kemudahan bagi investor untuk masuk, seperti birokrasi yang terjerat dan tidak mengikuti perkembangan pusat; hal ini dibuktikan dengan pemerintah Provinsi Jambi yang cenderung lambat dalam mengikuti aturan investasi dari pusat, seperti program OSS yang diresmikan secara nasional pada 9 Juli 2018, namun baru disosialisasikan oleh Provinsi Jambi pada 5 Oktober 2021 (Yandi Hajrudin, 2021).

#### Tantangan Eksternal

##### Pengaruh Pandemi *Covid-19* terhadap Iklim Investasi di Provinsi Jambi

Pandemi *Covid-19* telah berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk daerah perbatasan seperti Provinsi Jambi. Pembatasan aktivitas dan mobilitas memperlambat aktivitas ekonomi Provinsi Jambi, yang menyebabkan penurunan ekonomi daerah. Pada 2016-2018, perekonomian Provinsi Jambi meningkat namun menurun drastis pada 2020. Nilai ADHB PDRB dan ADHK PDRB Provinsi Jambi cenderung terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019 namun turun pada tahun 2020, inflasi menurun drastis pada tahun 2020

dibandingkan tahun 2016 dan garis kemiskinan meningkat sebesar 5,56% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2016 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, 2020).

Investasi asing yang masuk ke Provinsi Jambi juga mengalami penurunan akibat *Covid-19*, ketidaksesuaian target FDI dengan realisasinya sangat kontras pada tahun 2020, dimana targetnya berada di angka Rp.92,86 Triliun, dan yang dapat direalisasikan hanya Rp.27 Triliun (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, 2020). Hal ini bisa terjadi karena daya tarik dan daya dukungnya masih cukup rendah. Investasi yang masuk masih belum mampu meningkatkan keterkaitan pengusaha lokal dan tidak memberikan kesempatan kerja yang luas. Salah satu faktor yang membuat investasi menjadi lemah adalah karena proses birokrasi yang boros, dukungan infrastruktur yang lemah, sistem perizinan yang rumit dan tidak tersedianya jaminan keamanan usaha sehingga investor harus siap menghadapi ekonomi yang berbiaya tinggi. Kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas yang diterapkan pemerintah daerah juga berdampak pada beberapa sektor ekonomi seperti jasa transportasi dan perhotelan (DJPb Jambi, 2021).

### **Kendala bagi Thailand untuk Berinvestasi di Provinsi Jambi**

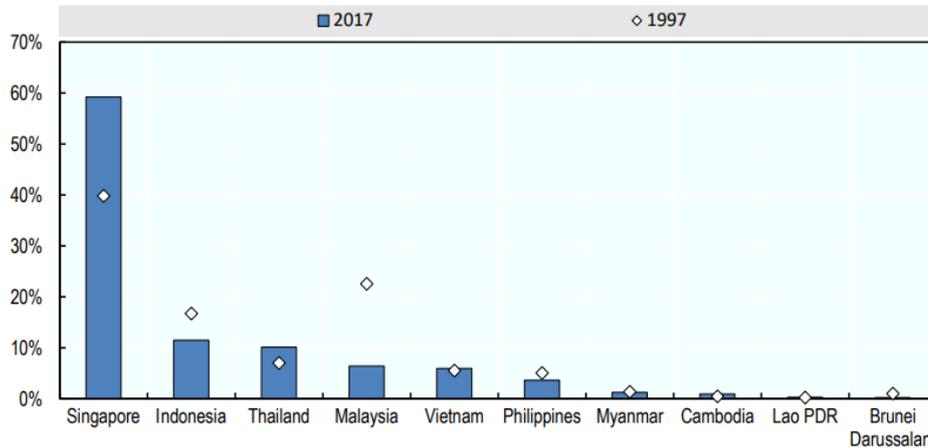
Dua tahun setelah peresmian IMT-GT, *East Asia Analytical Unit of Australia* memprediksi tantangan terbesar yang akan dihadapi IMT-GT ke depan adalah memastikan distribusi manfaat yang seimbang antara negara-negara peserta, mengingat tidak semua anggota memiliki potensi dan kemajuan ekonomi yang sama. Dan IMT-GT, yang hanya merupakan forum, tidak dapat memaksa atau memberikan sanksi kepada negara-negara anggota yang kurang

aktif atau tidak tertarik untuk membelanjakan dana untuk berinvestasi di negara-negara anggota lainnya. IMT-GT hanya dapat mengambil pendekatan persuasif, sehingga bagaimana IMT-GT mengupayakan agar hubungan kerja sama antar anggota dapat terjalin secara adil dan semua mendapatkan manfaat yang seimbang merupakan tantangan utamanya (East Asia Analytical Unit, 1995).

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ada lima kendala yang menghambat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu insentif perpajakan dan non-keuangan yang tidak menguntungkan, birokrasi yang memberatkan, prosedur pembebasan lahan yang menantang, dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan SDM lokal dengan pelatihan, infrastruktur, dan utilitas publik yang tidak memadai (Meilani, 2019). Masalah ini paling banyak terjadi di daerah perbatasan karena lahan di daerah perbatasan biasanya marjinal, daerah perbatasan jauh dari pusat kegiatan, dan partisipasi luar sangat terbatas (Budianta, 2010). Provinsi Jambi, daerah perbatasan yang menghadapi berbagai kendala, dan pemerintah provinsi yang biasanya lambat memenuhi kriteria investasi terpusat, seperti program OSS yang diperkenalkan secara nasional pada 9 Juli 2018, tetapi tidak oleh Provinsi Jambi hingga 5 Oktober. 2021 (Yandi Hajrudin, 2021). Pertimbangan tersebut menyulitkan investor internasional untuk menanamkan modalnya di wilayah perbatasan seperti Provinsi Jambi.

Meski begitu, menurut data yang tercantum dalam *OECD Investment Policy Review of Thailand*, Indonesia merupakan negara kedua setelah Singapura yang menjadi destinasi favorit investor untuk berinvestasi langsung di ASEAN, sedangkan Thailand menempati urutan ketiga. Penggambaran lain seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Gambar 1. Perbandingan Jumlah PMA yang Masuk di Negara-Negara ASEAN Tahun 1997 dan 2017



Seperti dilihat dari gambar di atas, Indonesia menempati urutan kedua sebagai tujuan investasi peringkat kedua setelah Singapura, disusul Thailand. Namun, dibandingkan dengan persentase Indonesia pada tahun 1997, terjadi pengurangan jumlah investasi langsung yang masuk, sedangkan Thailand, jika dibandingkan dengan persentase

investasinya pada tahun 1997, mengalami peningkatan pada tahun 2017. Thailand memang memprioritaskan kemajuan ekonomi, yang juga dituangkan dalam rencana jangka panjang dan jangka pendeknya melalui berbagai cara, salah satunya adalah investasi asing, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rencana Jangka Panjang dan Pendek Thailand

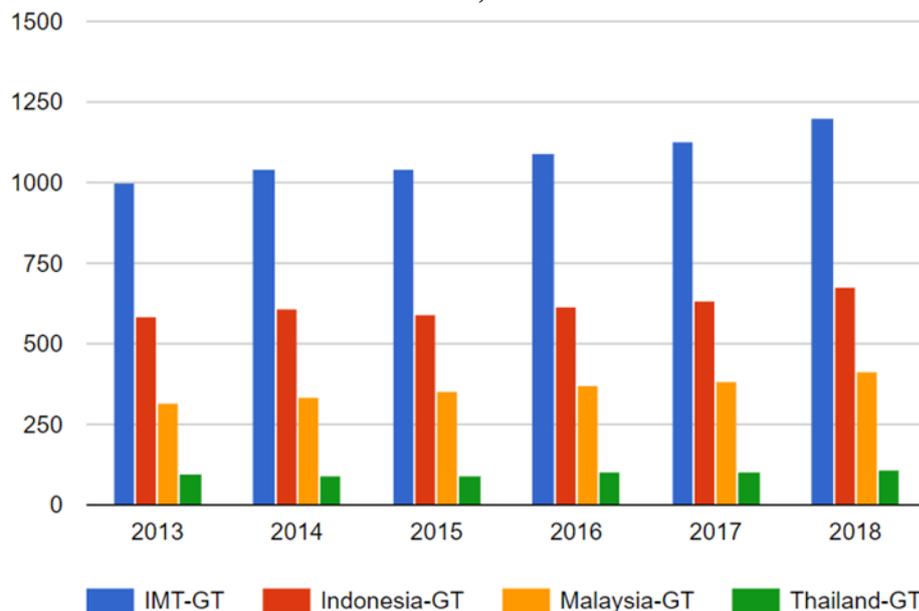
Tidak	Rencana	Strategi
1	Strategi Nasional B.E. 2561–2580 (2018–2037) (Rencana Jangka Panjang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negara maju dengan keamanan, kemakmuran, dan keberlanjutan sesuai dengan Falsafah Ekonomi Kecukupan.</li> <li>Pusat utama bagi transportasi, manufaktur, perdagangan, investasi, dan operasi bisnis di kawasan ini untuk mencapai pembangunan yang kuat</li> </ul>
2	Rencana Pembangunan Nasional 2017–2021 (Rencana Jangka Pendek)	<p>Mendorong perekonomian yang kuat, berdaya saing, stabil dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat konektivitas antara Thailand dan negara-negara lain di tingkat subregional. Mempromosikan Thailand sebagai aktor utama dalam perdagangan, jasa, dan investasi dalam kerangka kerja subregional.</li> <li>Thailand telah menjadi mitra penting dalam kerja sama subregional. Transportasi, logistik, dan rantai nilai harus saling berhubungan. Tingkat investasi dan ekspor dari Thailand ke negara-negara subregional harus</li> </ul>

Sehingga dapat disimpulkan dilihat dari rencana nasional jangka panjang dan pendek Thailand, memajukan perekonomian negara dan berjuang sebagai aktor yang berkontribusi banyak untuk meningkatkan perekonomian

*meningkat.*

negara-negara sub-regionalnya adalah prioritas. Cara yang dilakukan Thailand adalah dengan meningkatkan investasinya di sub-kawasan, salah satunya Indonesia, hanya saja pertumbuhan PDB Thailand masih lebih rendah dari Indonesia.

**Gambar 2 PDB IMT-GT dan Negara-negara Anggotanya 2013-2018 (dalam miliaran)**



Oleh karena itu, Thailand yang masih mengupayakan kemajuan ekonominya juga lebih selektif dalam memilih tempat untuk menginvestasikan modalnya. Daerah perbatasan seperti Provinsi Jambi memiliki banyak kendala bagi Thailand sebagai investor untuk masuk, permasalahan yang dihadapi seperti: infrastruktur yang tidak memadai, intervensi luar yang sangat terbatas, lahan di daerah perbatasan yang umumnya marjinal dan lokasi daerah perbatasan yang jauh dari pusat kegiatan, sehingga menyulitkan proses kerja sama yang sedang berlangsung. Selain itu, Indonesia lebih diutamakan sebagai tujuan investasi oleh negara-negara di luar IMT-GT dibandingkan dengan Thailand. Alasan-alasan inilah yang melatarbelakangi mengapa Thailand tidak

berinvestasi di Provinsi Jambi pada 2017-2021.

#### 4. KESIMPULAN

Tujuan kerja sama sub-regional IMT-GT adalah untuk memperkuat ketiga negara dan komunitasnya dalam rangka menghadapi liberalisasi dan integrasi ekonomi di ASEAN dan dunia secara keseluruhan. Dalam proses kerja sama IMT-GT dengan Provinsi Jambi, sejumlah kendala ditemukan. Hambatan ini dikategorikan sebagai internal atau eksternal. Provinsi Jambi dinilai kurang mendapat fasilitasi investor, seperti birokrasi yang berbelit-belit dan tidak mengikuti perkembangan pusat. Hal ini dibuktikan dengan Pemprov Jambi yang cenderung lambat dalam mematuhi aturan investasi dari pusat, seperti program OSS yang diluncurkan

secara nasional pada 9 Juli 2018, namun belum digulirkan oleh Provinsi Jambi hingga 5 Oktober 2021. Sebagai hasil dari proses birokrasi yang luas, kurangnya dukungan infrastruktur, kompleksitas sistem perizinan, dan tidak adanya jaminan keamanan perusahaan, investor harus siap untuk ekonomi berbiaya tinggi. Beberapa sektor perekonomian, seperti jasa transportasi dan penginapan, terdampak oleh kebijakan pemerintah daerah yang membatasi aktivitas dan mobilitas.

## 5. REFERENSI

- Aggarwal, A. (2022). *Zona Ekonomi Khusus di Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand: Peluang untuk Kolaborasi* (Edisi Februari).
- Arum Tarina. (2020). Urgensi Izin Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Sains, Vol. 14 No, 90*.
- Bank Pembangunan Asia. (2010). *Tinjauan Jangka Menengah Peta Jalan Pembangunan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT): 2007-2011*. Kerjasama dan Integrasi Regional. <https://www.adb.org/publications/mid-term-review-indonesia-malaysia-thailand-growth-triangle-imt-gt-roadmap-development>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026. *Pemprov Jambi*, 451. [https://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/Dokumen\\_perencanaan/42/PERDA-N0.-11-TAHUN-2021-TENTANG-RPJMD-PROVININSI-JAMBI-TAHUN-2021-2026](https://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/Dokumen_perencanaan/42/PERDA-N0.-11-TAHUN-2021-TENTANG-RPJMD-PROVININSI-JAMBI-TAHUN-2021-2026)
- BPS Provinsi Jambi. (2018). Provinsi Jambi Dalam Angka 2018. Di *BPS Provinsi Jambi*.
- BPS Provinsi Jambi. (2019). Provinsi Jambi Dalam Angka 2019. Di *BPS Provinsi Jambi*.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan daerah di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(1), 72–82. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/628/546>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Inkuiri Kualitatif dan Desain Penelitian: Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (edisi ke-4th). Thousand Oaks: Publikasi SAGE.
- DJPb Jambi, K. (2021). Tinjauan Fiskal Daerah Provinsi Jambi. *Tinjauan Fiskal Daerah Provinsi Jambi 2021*, 148. <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/26/d077e67ada9a93c99131bcde/statistik-pendidikan-2021.html>
- Joni Dawud, dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Single Submission Online Pelayanan Perizinan Berusaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol 12 No. , hlm 83-92*.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). *Fasilitasi Izin Usaha, Pemerintah Indonesia Luncurkan Sistem OSS Berbasis Risiko*. Bkpm.Go.Id. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/permudah-izin-usaha-pemerintah-indonesia-luncurkan-sistem-oss-berbasis-risiko>
- Meilani, H. (2019). Hambatan Peningkatan Investasi Asing di Indonesia dan Solusinya. *Info Cekat, 11(19)*, 1–6.
- Muharni, I. N. (2020). *Capaian Kerjasama Ekonomi Sub-regional IMT-GT. Dipresentasikan pada acara FGD: "Penyusunan Kertas Masukan Cetak Biru Implementasi IMT-GT (IMMT-GT IB) 2022-2026. Tanggal 29 September 2020*.
- Tarwini, U. B. R. & W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Single Submission (OSS) Online: Studi Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan, Volume 10*.
- Umar, D. D. H. F. (2018). *Potensi Ekonomi di Provinsi Jambi. Forum Menteri dan Gubernur IMT-GT (CMGF) ke-16. Tanggal 12 September 2018*.
- Unit Analisis Asia Timur. (1995). *Dalam Segitiga Pertumbuhan Asia Tenggara*. Perpustakaan Nasional Australia.
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.
- Yandi Hajrudin. (2021). *DPM-PTSP Provinsi Jambi Gelar Sosialisasi OSS Berbasis Risiko bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Provinsi Jambi*. DPM-PTSP PROVINSI JAMBI. <https://dpmptsp.jambiprov.go.id/berita/howmore/75/DPM-PTSP-Provinsi-Jambi-Gelar-Sosialisasi-OSS-Berbasis-Risiko-Bagi-Pemerintah-Daerah-dan-Pelaku-Usaha-Provinsi-Jambi>
- Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya bagi Negara Berkembang: Tinjauan Pendekatan Ekonomi Islam. *Al-Tijary*, 1(1). <https://media.neliti.com/media/publications/141387-ID-globalisasi-ekonomi-dan-implikasinya-bag.pdf>.